

Nilai-nilai Luhur Pancasila dalam Mencegah Terjadinya Kecurangan¹

Oleh:

Prof. Dr. Unti Ludigdo, Ak, CA
Guru Besar Etika Bisnis dan Profesi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Pendahuluan: Kecurangan dan Runtuhnya Moral Bangsa

Kecurangan (*fraud*) seolah telah menjadi tradisi baru atau bahkan budaya kekinian Indonesia. Penangkapan aparaturnya pemerintahan/negara di eksekutif, legislatif dan yudikatif oleh KPK seolah telah menjadi drama kehidupan sehari-hari bangsa ini. Dibumbui “iklan” prestasi sepakbola tim nasional U-19 menjuarai piala AFF 2013 ataupun prestasi beberapa siswa/mahasiswa dalam olimpiade sains atau suatu bidang ilmu, drama ini secara lugas dan seolah terskenario dengan apik dipertontonkan kepada masyarakat tanpa sensor apapun. Akibatnya siapapun dapat memperhatikan detail suatu peristiwa yang kemudian dikonfirmasi melalui rekonstruksi hukum suatu acara debat ahli di televisi.

Argumentasi apakah yang dapat kita berikan untuk mengelak dari konotasi negatif sebagai bangsa curang tersebut di atas ketika memperhatikan, misalnya, peristiwa-peristiwa besar sepanjang tahun 2013 ini: (1) Pada 2 Oktober 2013 KPK menangkap tangan Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. M. Akil Mochtar, SH yang menerima suap atas kasus peradilan yang dipimpinnya dengan Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Partai Golkar Chairunnisa bersama pengusaha Tubagus Chaeri Wardana (adik kandung Gubernur Banten); (2) Pada 13 Agustus 2013 KPK menangkap tangan Kepala SKK Migas Prof. Dr. Rudi Rubiandini atas suap yang terkait dengan pengelolaan hulu minyak dan gas bersama dengan pengusaha minyak dari perusahaan multinasional (PT Kernell Oil) dan pelatih golf; (3) Pada 29 Januari 2013 Presiden PKS ditangkap KPK terkait kasus impor daging sapi dan kemudian disertai dengan berbagai cerita asmara dibalik kehidupan para tokohnya. Bagaimanapun serial peristiwa ini menyambung kisah-kisah sebelumnya yang menyangkut beberapa tokoh penting negeri ini.

Demikian halnya kecurangan di negeri ini juga melibatkan para pelaku usaha atau korporasi. Kecurangan korporasi ini sangat merugikan bangsa karena potensi dana yang hilang yang seharusnya dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan mencapai trilyunan rupiah. Beberapa informasi berikut (yang mungkin masih merupakan suatu indikasi) setidaknya dapat menggambarkan besarnya kehilangan potensi dimaksud:

(1) Di sektor kehutanan, Indonesian Corruption Watch (ICW)² merilis terdapat potensi kerugian negara yang mencapai Rp 691 triliun dari 124 kasus kejahatan korporasi yang

¹ Disampaikan pada Seminar Nasional 4 (Empat) Kebangsaan dalam Mencegah Terjadinya Fraud di Lingkungan Pemerintahan Indonesia di Jurusan Akuntansi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 31 Oktober 2013.

terjadi dalam kurun tahun waktu 2011-2012. Dalam hal ini modus kejahatannya antara lain meliputi: (a) Alih fungsi lahan, seperti proyek kelapa sawit sejuta hektar; (b) Pemanfaatan hasil hutan secara tidak sah; dan (c) Penghindaran dan manipulasi pajak seperti kasus Asian Agri; dan (2) Di sektor mineral dan batubara (Minerba), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)³ menemukan adanya kerugian dalam penerimaan negara sebesar Rp 6,7 triliun. Kerugian ini diakibatkan adanya tunggakan pembayaran royalti dan iuran Minerba yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kurun waktu 2003 – 2011.

Lalu bagaimana dengan peristiwa kecurangan pada masyarakat kelas menengah di negeri ini? (1) Salah satu yang paling aktual adalah terungkapnya tindak pidana penyimpangan pemberian fasilitas pembiayaan terhadap 197 nasabah secara fiktif di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Bogor senilai Rp 102 milyar pada 23 Oktober 2013. Dalam kasus ini kepolisian telah menetapkan tiga tersangka, yaitu Kepala Cabang Utama BSM Bogor M Agustinus Masrie, Kepala Cabang Pembantu BSM Bogor Chaerulli Hermawan, dan Accounting Officer BSM Bogor John Lopulisa.

(2) Ilustrasi lainnya adalah yang terjadi pada para pegawai Ditjen Pajak. Pada 21 Oktober 2013, seolah melengkapi cerita nestapa di balik “gelimang kesuksesan” para pegawai Ditjen Pajak berekening gendhut (seperti Gayus H. Tambunan, Dana Widyatmika dll.), Bareskrim Mabes Polri menangkap Denok Taviperiana dan Totok Hendriyatno dalam kasus suap restitusi pajak PT PT Surabaya Agung Industri and Paper yang kasusnya terungkap sejak 2011 senilai Rp 21 milyar.

(3) Kejadian yang juga memprihatinkan adalah pelaksanaan Ujian nasional (UN) yang hampir setiap tahunnya selalu diikuti dengan kasus kecurangan, baik menyangkut pembiayaannya maupun ujiannya itu sendiri. Terkait pembiayaan UN, BPK menginformasikan⁴ bahwa terdapat penyimpangan anggaran dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) pada tahun 2012 dan 2013 yang berpotensi merugikan keuangan negara sekitar Rp 14 miliar rupiah. Rincian penyimpangan ini terjadi dalam proses lelang pencetakan dan distribusi bahan UN pada tahun 2013 sebesar Rp 6,348 miliar dan pada tahun 2012 sebesar Rp 8,155 miliar. Selain itu juga disebutkan bahwa BPK juga menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp 2.665.361.081 yang berasal dari pemotongan belanja sejumlah Rp 888.600.000 serta kegiatan fiktif dan *mark up* sejumlah Rp 1.776.761.081.

Bagaimana menyangkut ujiannya? Koalisi Pendidikan⁵ menemukan bukti kecurangan dalam pelaksanaan UN tingkat SMA/SMK/MA 2013. Dalam kasus ini ditunjukkan bukti kecurangan

² <http://www.centroone.com/news/2013/10/2r/potensi-kerugian-negara-sektor-kehutanan-capai-rp-691-t/download> 28 Oktober 2013.

³ <http://skalanews.com/berita/detail/153325/Potensi-Kerugian-Negara-di-Sektor-Minerba-Capai-Rp67-triliun/download> 28 Oktober 2013.

⁴ <http://news.detik.com/read/2013/09/19/155521/2363689/10/bpk-temukan-penyimpangan-un-sebesar-rp-14-miliar/download> 21 Oktober 2013.

⁵ <http://edukasi.kompas.com/read/2013/05/27/11322671/Kecurangan.UN.Diungkap/download> 21 Oktober 2013.

antara lain berupa satu lembar kunci jawaban, yang mana bukti itu diperoleh dari seorang siswa dari sekolah swasta di Jakarta yang mengadu kepada gurunya. Kemudian *Indonesian Corruption Watch* (ICW)⁶ melaporkan kepada Itjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang adanya kecurangan Ujian Nasional (UN) tahun 2013 di sebuah sekolah menengah kejuruan di Jakarta Selatan.

Keadaan demikian juga terjadi pada masyarakat kelas bawah yang melakukan kecurangan bukan lagi sekedar menutupi kekurangan kebutuhan hidup. Beberapa media memberitakan bahwa sekelompok pengemis dan anak jalanan di Bandung lebih memilih terus menjadi pengemis daripada bekerja sebagai pekerja sektor informal yang lebih mulia (penyapu jalan). Betapa mengagetkan jawaban mereka ketika Walikota Bandung menawarkan mereka pekerjaan yang lebih mulia tersebut. Dalam suatu dialog di sela demonstrasi, salah satu dari mereka mengatakan⁷:

"Kalau mau dipekerjakan seperti itu, apakah Bapak siap menggaji sesuai dengan kebutuhan mereka? Apakah Bapak bisa menggaji mereka Rp 4 sampai Rp 10 juta? Kalau hanya gaji 700 ribu, tidak akan cukup," ujar Priston, salah seorang orator dari kelompok yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Jalanan."

Paparan di atas menunjukkan realitas bangsa kita yang telah sampai pada titik moral terendahnya. Situasi ini bertolak belakang dengan idealisme bangsa yang sangat mulia sebagaimana terumuskan dalam piagam agung Pancasila. Bangsa ini baru memosisikan Pancasila sebagai sekedar simbol kebangsaan belaka. Dengan memosisikan Pancasila sebagai simbol belaka, penyerapan nilai-nilai luhurnya bagi kehidupan sehari-hari hanya bersifat simbolik. Bahkan dengan ini kemudian Pancasila ditempatkan dalam museum sejarah masa lalu. Pancasila bukan lagi sebagai ideologi kehidupan maupun pandangan hidup bangsa dalam menjalani kesehariannya, dan karenanya ia telah mati dari sanubari bangsa ini. Masih mungkinkah Pancasila hadir untuk menjadi inspirasi bangsa ini untuk memperbaiki diri dan bangkit dari keterpurukan moralnya?

Mengapa Kecurangan (*Fraud*) Terjadi?

Kecurangan terjadi karena berbagai sebab, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Yang paling mendasar dari berbagai sebab itu adalah karena ketamakan (*greediness*). Semangat untuk memenuhi keinginan (bukan kebutuhan) yang seolah tiada batas menjadikan seseorang melakukan tindakan apapun. Keinginan ini dipicu oleh gaya hidup konsumerisme yang mengagungkan kepuasan materi dan pula mengagungkan penampilan mewah pada kalangan tertentu. Didukung oleh lingkungan kerja dan ataupun lingkungan

⁶ <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/419593-icw-laporkan-kecurangan-ujian-nasional-ke-itjen-kemdikbud/didownload> 21 Oktober 2013.

⁷ <http://www.tribunnews.com/regional/2013/10/01/pengemis-di-bandung-minta-gaji-rp-10-juta/di> download 20/10/2013.

keluarga yang permisif dengan kecurangan, maka melakukan tindakan curang itu dianggap sebagai suatu kewajaran dan bahkan keharusan.

Dalam lingkungan kerja yang sedemikian permisif dengan suap, menjadi tidak wajar jika seseorang menolak suap. Dalam lingkungan kerja yang sedemikian mengagungkan penampilan yang dibalut kemewahan, maka seseorang yang berpenampilan sederhana dianggap sebagai kolot dan konyol. Dalam lingkungan keluarga yang mengagungkan kekayaan materi sebagai ukuran kesejahteraan, maka seseorang yang tidak kaya materi akan dianggap tidak berhasil dalam menjalani kehidupannya. Dalam lingkungan keluarga yang tidak pernah puas dengan yang dicapai dan dimiliki, maka seseorang akan selalu terobsesi untuk memiliki segalanya. Lingkungan seperti ini kemudian dapat menekan atau mendorong psikologis seseorang untuk melakukan tindakan curang yang mungkin dapat dilakukan.

Kemungkinan melakukan kecurangan akan semakin terbuka ketika kesempatan itu tercipta. Kesempatan tercipta karena sistem yang berkembang dalam suatu organisasi terlalu lemah mengontrol perilaku buruk para pihak yang terlibat dalam aktifitas organisasi tersebut. Pada organisasi sektor publik sebenarnya telah dibentuk berbagai perangkat pengendalian perilaku para pihak yang terlibat, khususnya pihak internal. Namun karena masih melekatnya asumsi "tahu sama tahu" atas penyimpangan yang terjadi dan "jeruk makan jeruk" dalam mekanisme pengendalian, maka kecurangan semakin menjadi-jadi. Bagaimanapun dalam diskusi ini Bologna dan Linquist (1987; 7-13) dan Puspito dkk. (2011; 37-51) menggambarkan secara lebih detail mengapa kecurangan terjadi atau dilakukan seseorang. Secara umum dapat ditarik suatu pemahaman bahwa terjadinya kecurangan disebabkan kombinasi faktor internal dan eksternal individu tersebut, seperti situasi organisasi dan lingkungan yang lebih luas.

Pancasila sebagai ideologi Perlawanan Terhadap Kecurangan (*Fraud*)

Menarik keterkaitan atas fenomena di atas dengan keberadaan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa bukanlah hal yang tidak mungkin. Dengan kata lain menjadikan Pancasila sebagai ideologi perlawanan terhadap kecurangan yang sudah sedemikian akut di negeri ini bukanlah sesuatu yang mustahil. Mengapa demikian karena Pancasila memiliki pandangan moral luar biasa yang terkandung dalam sila-silanya. Latif (2011; 41-42) mengemukakan bahwa Pancasila merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa. Sebagai basis moralitas dan haluan kebangsaan-kenegaraan, Pancasila memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang kuat dalam mana setiap sila memiliki justifikasi historis, rasional dan aktual yang dipahami, dihayati, dipercayai, dan diamalkan secara konsisten sehingga dapat menopang pencapaian-pencapaian agung peradaban bangsa ini.

Jika kesadaran terdalam kita sampai pada ujung pemaknaan bahwa kecurangan (termasuk korupsi dan suap) akan menghancurkan suatu peradaban bangsa dan menistakan kemanusiaan, maka seharusnya kita menggelorakan “perang kemerdekaan” jilid II. Sebagaimana yang dilakukan para pejuang pendahulu dalam melawan belenggu penjajahan dan kebiadaban, semangat terbebas dari belenggu kecurangan harus digaungkan saat ini. Perlawanan ini antara lain dilakukan dengan menghidupkan dan memperkuat kembali (revitalisasi) nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata, bukan sekedar diwacanakan.

1. Ketuhanan sebagai Pondasi Spiritual

Nilai-nilai ketuhanan merupakan sumber moralitas dan spiritualitas (yang bersifat vertikal-transendental) bagi Bangsa Indonesia. Ini sudah merupakan kenyataan hakiki dalam mana Tuhan telah “hadir” dalam relung jiwa manusia Indonesia sejak lampau, meski usaha-usaha untuk mencerabutnya terus menerus dilakukan oleh para kolonialis. Hal demikian menunjukkan bahwa sejarah panjang perjuangan mencapai dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, banyak dilandasi oleh semangat keberagamaan. Etos perjuangan para pendahulu bangsa yang sangat kuat dilandasi oleh semangat ketuhanan ini, antara lain dapat diperhatikan dalam pernyataan Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga yang berbunyi, “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa ...”, dan pekik gemuruh “Allahu Akbar” yang disuarakan oleh Bung Tomo saat menggelorakan semangat juang rakyat pada perang kemerdekaan 10 Nopember 1945 di Surabaya.

Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan suatu keyakinan atas Tuhan. Suatu keyakinan esensial bagi Bangsa Indonesia karena Tuhan adalah “Sang Sangkan Paraning Dumadi” dan puncak dari segala puncak. Bagi mayoritas manusia Indonesia, keyakinan atas Tuhan diikuti dan didapatkan dari ajaran agama, oleh karena itu keberadaan dan identitas agama juga merupakan warna tersendiri dalam ketatalaksanaan negara. Lepas dari keragaman agama yang diakui di Indonesia, semuanya sepakat bahwa agama menuntut dan menuntun pada kebaikan hidup para penganutnya. Namun yang patut disayangkan adalah pola keberagamaan kita yang saat ini masih menekankan pada ketaatan formal (ritual), belum sampai pada hakekat (pemaknaan spiritual) atas berbagai ritual rutin yang dilakukan.

Dalam konteks pola keberagamaan Islam, jika syahadat itu merupakan pernyataan keyakinan substansif kita akan keesaan Tuhan, maka seharusnya kita juga tidak mengeramatkan atau memesonakan selain-Nya (misalnya jabatan/kekayaan/prestise) karena itu adalah syirik. Dengan pemahaman demikian maka ketika kita menjadikan jabatan/kekayaan/prestise sebagai orientasi utama hidup kita, maka kita sudah terjebak pada kemusrikan. Hidup dalam kemusrikan sudah tentu tidak berkah, dan karenanya menjadikan jabatan/kekayaan/prestise sebagai orientasi utama dalam kehidupan kita pasti akan berakibat ketidakberkahan. Sedemikian terpesonanya kita pada jabatan/kekayaan/prestise itu sehingga semangat dan cara mencapainya pun sarat dengan kecurangan.

“Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa (pada

hari kiamat), bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaan-Nya (niscaya mereka menyesal) (QS. Albaqarah, ayat: 165).”

Jika dengan syahadat itu kita juga menyakini bahwa Muhammad SAW itu adalah Rasul Tuhan, mengapa ajaran moral yang dibawanya dengan sangat gampang ditanggalkan? Bukankah Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlaq? Lalu di manakah keluhuran akhlaq kita jika perbuatan curang sudah menjadi hal yang wajar? Dalam kaitan ini satu contoh akhlaq yang luarbiasa baiknya diajarkan Rasulullah SAW untuk kita aplikasikan dalam menghindari kecurangan adalah selalu berniat baik dalam menjalani berbagai aktifitas. Jika kita melakukan aktifitas dengan niat untuk mendekati diri kepada Allah maka itu akan mendapatkan pahala yang besar, dan sebaliknya jika meniatkan bukan untuk mendekati diri kepada Allah maka yang kita dapatkan hanya kenikmatan dunia, baik berupa kedudukan, pujian, melimpahnya harta atau yang lainnya. Terbukti bahwa kebanyakan kenikmatan-kenikmatan dunia ini akan menghanyutkan dan kemudian menenggalamkan manusia pada kesesatan (perhatikan beberapa kejadian yang dipaparkan di atas).

Memahami lebih lanjut tentang sila Ketuhanan Yang Maha Esa, maka sebagai manusia Indonesia seharusnya kita berpegang teguh pada kaidah ihsan, mengikuti kaidah iman dan Islam, yang dinyatakan dalam suatu hadist, “Hendaklah kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat-Nya, dan jika engkau tidak dapat melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia melihatmu” (H.R. Muslim). Komitmen ketuhanan ini dijadikan sebagai sumber motivasi dan inspirasi dalam menjalani kehidupan. Ihsan sepenuhnya dapat menjadikan seseorang sebagai pribadi yang selalu berbuat baik. Dengan demikian ihsan juga bermakna suatu keadaan di mana seorang manusia mencurahkan kebaikan dan menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain. Perbuatan baik ini antara lain diwujudkan dengan sifat-sifat kejujuran, kerendahhatian dan ketulusan dalam menjalani aktifitas kehidupannya. Ini kemudian akan berlanjut pada penciptaan suasana kehidupan yang dipenuhi cinta kasih pada sesama. Memperhatikan hal demikian, maka perlawanan terhadap berbagai tindak kecurangan harus selalu dihubungkan dengan nilai-nilai bahwa manusia Indonesia harus (lihat butir-butir Pedoman Penghayatan dan Pemngamalan Pancasila/P4):

- ✓ Menyatakan kepercayaan dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- ✓ Percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- ✓ Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Selanjutnya untuk membawanya dalam taraf implementasi, pernyataan Ludigdo (2012) ini patut untuk diperhatikan:

“Nilai-nilai ketuhanan merupakan sesuatu yang fundamental dan alamiah terdapat dalam kehidupan akuntan (manusia) Indonesia untuk menjalankan tugas mulia menuntaskan visi hidupnya. Di alam Indonesia, Tuhan dianggap mempunyai peran penting untuk mempromosikan sikap dan perilaku etis. Untuk itu akuntan (manusia) Indonesia harus selalu didorong untuk menjaga komitmen dirinya kepada Tuhan dan

kemudian menghasilkan sikap dan perilaku menghindari perbuatan yang dilarang oleh Tuhan, serta sekaligus menyebarkan rahmat kepada semesta. Seharusnya dengan disemangati oleh nilai-nilai ketuhanan seperti ini, akuntan (manusia) Indonesia akan merealisasikan visi mulia kehidupannya melalui profesinya.”

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Ludigdo (2012) mengemukakan bahwa nilai-nilai kemanusiaan yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam dan sifat-sifat sosial manusia (yang bersifat horizontal) merupakan unsur penting pembentuk pondasi kehidupan Bangsa Indonesia dalam membangun relasi antar sesama dan antar bangsa. Ini merupakan karakter yang unik dan mendasar sebagaimana kemudian disebut sebagai trilogi kehidupan manusia Indonesia yang selalu dikaitkan dengan hubungan antara manusia dengan Tuhan (*hablunminallah/parahyangan*), manusia dengan sesamanya (*hablunminannas/pawongan*) dan manusia dengan alam (*hablunminal'alam/palemahan*).

Nilai-nilai kemanusiaan yang bersandar pada ketuhanan ini bukanlah dalam pengertian sekedar mengikuti paham pengutamaan hak-hak individual (individualisme) sebagaimana yang diusung banyak negara barat, namun harus diletakkan pada pentingnya paham kekeluargaan yang khas Asia khususnya di nusantara. Mengesankan sekali jika kita memperhatikan kembali pandangan para pendiri negara yang disampaikan melalui pidato di sidang BPUPKI tanggal 10-15 Juli 1945. Soekarno menyatakan dengan tegas, “Jikalau betul-betul hendak mendasarkan negara pada paham kekeluargaan, paham tolong menolong, paham gotong royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap-tiap paham individualisme dan liberalisme dari padanya.” (lihat Latif, 2011; 183). Lebih lanjut Bung Hatta pernah mengatakan, “Yang harus disempurnakan dalam Pancasila, ialah kedudukan manusia sebagai hamba Allah, yang satu sama lain harus merasa bersaudara. Oleh karena itu sila kemanusiaan yang adil dan beradab langsung terletak di bawah sila pertama. Dasar kemanusiaan itu harus dilaksanakan dalam pergaulan hidup. Dalam segala hubungan manusia satu sama lain harus berlaku rasa persaudaraan” (Latif, 2011; 240). Dengan ini yang dimaksudkan sebagai harkat kemanusiaan bukanlah yang justru menjadikan manusia Indonesia serakah dengan memangsa sesamanya dan seisi semesta alam.

Lebih dalam lagi, pandangan ketuhanan sebagaimana disebutkan sebelumnya juga berimplikasi pada pemaknaan sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Semangat ketuhanan mendorong tumbuhnya kesadaran untuk mengangkat harkat manusia Indonesia yang disifati adil dan beradab. Adil terhadap diri sendiri, sesama dan lingkungan alam. Sifat adil yang demikian akan mengantarkan kita menjadi manusia yang beradab. Dalam pola keberagaman Islam, manusia beradab itu adalah manusia yang dapat menjadi rahmat bagi semesta alam, sebagaimana pernyataan tentang Muhammad SAW yang diutus menjadi Rasulullah, “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam” (Surat al-Anbiya';107).

Nilai kemanusiaan yang dilandasi ketuhanan bukan hanya mengedepankan pemenuhan hak-hak individu dari masyarakat dan negara tetapi masyarakat dan negara juga tidak boleh mengabaikan hak-hak individu. Nilai kemanusiaan juga menuntut kewajiban individu-individu bagi masyarakat dan negara, sebaik masyarakat dan negara memenuhi kewajibannya bagi individu-individu warga negara. Nilai kemanusiaan yang dilandasi ketuhanan mengajarkan cinta kasih dan menjauhi sesuatu yang menyebabkan perendahan martabat manusia dan merugikan pihak lainnya. Perbuatan curang selalu dan pasti merugikan pihak lain dan juga pasti merendahkan martabat dirinya dan orang lain. Mengaitkan hal yang demikian, maka perlawanan terhadap berbagai tindak kecurangan ini dilakukan karena manusia Indonesia harus (lihat butir-butir P4):

- ✓ Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- ✓ Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban azasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
- ✓ Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
- ✓ Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
- ✓ Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
- ✓ Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
- ✓ Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
- ✓ Berani membela kebenaran dan keadilan.

Implementasi atas nilai kemanusiaan yang demikian mensyaratkan dimilikinya komitmen manusia Indonesia untuk memelihara karakter azasi kemanusiaannya yang cenderung kepada kebaikan (hanief). Selain itu sila ini menghendaki dilandasinya keyakinan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan untuk kemaslahatan semesta. Pengertian yang demikian selanjutnya dapat didalami dari ajaran sholat yang antara lain dalam pelaksanaannya selalu diawali dengan *takbiratul ikhram* dan diakhiri dengan salam.

3. Persatuan Indonesia

Aktualisasi nilai-nilai kemanusiaan dalam kerangka Pancasila harus berakar kuat pada visi kebangsaan yang kokoh oleh karena kemajemukan masyarakat Indonesia. Visi kebangsaan yang kokoh ini berupa komitmen untuk membangun kebersamaan menuju tercapainya cita-cita bersama. Membangun kebersamaan yang dilakukan dalam wadah Persatuan Indonesia, tidak mengharuskan tercerabutnya akar tradisi dan kesejarahan masing-masing komunitas suku, ras dan agama (Ludigdo, 2012). Jika saat ini Bangsa Indonesia menghadapi wabah penyakit moral berbagai tindak kecurangan, maka cita-cita bersama yang harus diusung adalah memerangi wabah kecurangan tersebut. Bagaimanapun, berbagai tindak kecurangan telah nyata mengancam persatuan bangsa. Keharmonisan hidup masyarakat digerogeti oleh berbagai pengkhianatan kemanusiaan oleh beberapa unsur personil penyelenggara negara dan juga sebagian masyarakat (pelaku usaha maupun masyarakat biasa) di berbagai bidang kehidupan. Jika berbagai tindak kecurangan sebagaimana dipaparkan di atas terus menerus

terjadi tanpa solusi yang jelas dan tegas, potensi disintegrasi bangsa akan terus berlanjut. Mengapa demikian karena akibat berbagai kecurangan tersebut pemerataan pembangunan tidak dapat dijalankan sehingga menjangkau seluruh wilayah Indonesia, kerusakan alam yang masif (yang juga berpengaruh terhadap kualitas lingkungan) dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, dan ketimpangan kesejahteraan material dan immaterial akan terjadi di berbagai wilayah tanah air. Tidak akan ada lagi kebanggaan pada diri warga negara terhadap Indonesia, yang dengan itu kemudian mereka akan mudah menggadaikan nasionalismenya. Memperhatikan hal di atas, sangat baik jika kita menyelami kembali Butir-Butir P4 yang secara jelas menyebutkan bahwa manusia Indonesia harus:

- ✓ Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- ✓ Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
- ✓ Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
- ✓ Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
- ✓ Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
- ✓ Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Nilai-nilai Pancasila dapat direaktualisasikan dengan mengarahkan semua tata peraturan menyangkut pembarantasan tindak kecurangan dalam konteks penjagaan Persatuan Indonesia, kewibawaan pemerintah dan Negara, serta dalam penegakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini bukan suatu kemustahilan karena kita dapat belajar dari negara lain, misalnya Kostarika yang menjadikan kejahatan korupsi sebagai suatu tindakan penghancuran sosial masyarakat⁸. Kehancuran sosial yang dialami masyarakat Kosta Rika akibat korupsi yang dilakukan Alcatel-Lucent tidak hanya bersifat material, tetapi juga imaterial, yaitu berupa hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam kasus tersebut, korporasi dinilai tak hanya merugikan keuangan negara karena adanya penggelembungan nilai proyek, namun kerugian juga dihitung berdasarkan kerugian yang dialami rakyat Kosta Rika karena tidak mendapatkan pelayanan komunikasi yang lebih baik dengan harga lebih murah yang seharusnya mereka dapatkan jika tender dilakukan secara benar. Oleh karenanya perusahaan harus membayar untuk memulihkan kepercayaan rakyat itu.

Dalam implementasinya situasi darurat melawan ganasnya wabah penyakit kecurangan ini membutuhkan keserempakan dari semua unsur masyarakat. Latif (2011; 374) menyampaikan pemikirannya:

“Persatuan Indonesia dalam kerangka *civic-political nationalism* menyaratkan loyalitas warga pada seperangkat cita-cita politik dan kelembagaan yang dianggap adil dan efektif. Untuk itu formasi kebangsaan dalam kerangka menghadapi musuh bersama

⁸ Konferensi Antikorupsi; Harga yang Harus Dibayar. Dipublikasikan oleh Indonesian Corruption Watch di <http://www.antikorupsi.org>

harus ditransformasikan menjadi usaha merealisasikan keadilan dan kesejahteraan bersama.”

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Dalam cara pandang Pancasila, prinsip kedaulatan tidak menghendaki situasi di mana suatu keputusan didikte oleh kalangan mayoritas atau kekuatan elit politik, pengusaha maupun yang lainnya, serta sebaliknya oleh minoritas kuat. Apalagi jika itu didikte oleh kekuatan dari luar negeri baik negara maupun korporasi. Menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmah/kebijaksanaan haruslah merupakan aktualisasi dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan dan cita-cita kebangsaan (Latif, 2011; 45).

Dalam praktik kehidupan bangsa kita saat ini, kedaulatan rakyat telah tergadaikan dengan supremasi uang dalam berbagai manifestasinya. Berbagai kasus tindak kecurangan sebagaimana dipaparkan di atas menunjukkan hal ini. Permufakatan jahat telah sedemikian telanjang dilakukan dengan mengorbankan kepentingan rakyat. Perselingkuhan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif terjadi sedemikian masif, meskipun dalam beberapa kasus yang terlihat hanyalah perilaku antar oknum pejabatnya. Kasus putusan MK yang melibatkan M. Akil Mochtar dengan anggota DPR dan eksekutif daerah, jika itu benar terjadi telah secara nyata menampakkan pengkhianatan atas prinsip kedaulatan rakyat yang berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab serta Persatuan Indonesia. Demikian halnya yang terjadi dalam kasus SKK Migas yang melibatkan Prof. Dr. Rudi Rubiandini sebagai kepalanya. Kebijakan institusi negara yang seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat malah digadaikan dengan sejumlah dolar. Keharusan pengutamaan kepentingan rakyat dalam suatu pengambilan keputusan telah direduksi untuk kepentingan pihak-pihak tertentu berdasar kekuatan uang.

Bagaimanakah sila keempat Pancasila direvitalisasi dalam kerangka pencegahan tindak kecurangan sebagaimana tergambarkan di atas? Pancasila telah mengajarkan bahwa rakyat merupakan institusi tertinggi di negeri ini. Ini berarti bahwa orientasi kebijakan maupun keputusan harus demi kepentingan rakyat bukan kepentingan diri maupun kelompok. Pemihakan pada kepentingan rakyat dipandu dengan hikmat kebijaksanaan melalui media musyawarah. Ini mengandung pengertian bahwa orientasi etis suatu kebijakan atau pengambilan keputusan harus dibangun melalui daya pandang yang jauh ke depan tidak hanya mempertimbangkan dampaknya di dunia saja, namun juga sampai di akhirat. Demikian pula kebijakan atau keputusan yang diambil bersama harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan sesama. Pada titik ini pemaknaan kepemimpinan dalam kerangka kedaulatan rakyat dapat dialamatkan pada fungsi manusia Indonesia sebagai khalifah di muka bumi ini dengan harus terus menjaga kemaslahatan. Di sinilah pentingnya manusia Indonesia untuk selalu mengasah daya emosional dan spiritualnya sebaik daya intelektualnya. Memperhatikan hal tersebut maka sangat relevan untuk kembali menjadikan beberapa butir P4 berikut ini sebagai referensi dalam mengimplementasikan sila keempat untuk pencegahan tindak kecurangan:

- ✓ Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
- ✓ Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
- ✓ Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Orientasi kebijakan atau pengambilan keputusan pada kepentingan rakyat yang dipandu oleh hikmah kebijakan akan berimplikasi pada perwujudan keadilan sosial. Visi keadilan sosial diwujudkan dalam penyeimbangan antara pemenuhan kebutuhan lahir dan batin, serta keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu dan peran manusia sebagai makhluk sosial. Dalam cara pandang Pancasila, perwujudan keadilan sosial ini sekaligus harus merupakan aktualisasi nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan, serta cita-cita kebangsaan yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Arah penegakan keadilan di Indonesia adalah pada rakyat secara keseluruhan. Soekarno secara tegas mengatakan, “Dengan menyetujui kata keadilan sosial dalam preambule, berarti merupakan protes kita yang mahahebat kepada dasar individualisme” (Latif, 2011; 187). Mengapa Soekarno bersikap sangat keras terhadap kapitalisme, liberalisme dan individualisme? Suseno (2003; 165) mengemukakan ciri kapitalisme:

”Hukum keras kapitalisme adalah persaingan. Demi persaingan, produktivitas produksi harus ditingkatkan terus menerus. Artinya, biaya produksi perlu ditekan serendah mungkin sehingga hasilnya dapat dijual semurah mungkin dan dengan demikian menang terhadap hasil produksi saingan. Dengan demikian lama kelamaan semua bentuk usaha yang diarahkan secara tidak murni ke keuntungan akan kalah.... Lama kelamaan semua bidang produksi maupun pelayanan dijalankan secara kapitalistik. Apa yang semula dijalankan secara iseng-iseng dan sampingan, misalnya membuka biro perjalanan, akan dijalankan dengan semakin efisien dan hal itu hanya mungkin dilakukan oleh usaha besar. Maka usaha kecil akan dimakan oleh yang besar.”

Kapitalisme hanya akan mendorong seseorang untuk sebanyak-banyaknya menumpuk kekayaan, serta kemudian menjebaknya dalam keserakahan. Kapitalisme yang ditopang oleh liberalisme akan mengakibatkan terpinggirkannya individu dan institusi yang lemah dari kancah kehidupan yang normal. Nilai kehidupan yang diagungkan dalam kapitalisme-liberalisme ini adalah materialisme. Suparman (2003) menguraikan tiga jenis kejahatan yang dinilai fungsional bagi sistem kapitalisme ini, yaitu:

“Pertama, *the crime of accommodation*; yaitu kejahatan yang timbul sebagai respon pelaku terhadap dorongan maksimum konsumsi atau sebagai usaha mempertahankan hidup dalam sistem di mana institusi-institusi perlindungan sosial kolektif telah

diperlemah demi efisiensi pertumbuhan kapitalisme. Jenis kejahatan ini meliputi *predatory-crimes*, yaitu jenis-jenis kejahatan kekerasan konvensional seperti perampokan, pencurian berat, pencurian dengan kekerasan, penipuan dll.

Kedua, *the crimes of economic domination*, yaitu jenis-jenis kejahatan oleh para pelaku bisnis berupa penipuan pajak, kejahatan lingkungan, eksploitasi buruh, penyimpangan kontrak karya, penipuan informasi penjualan produk, penanaman citra produk dan lain sebagainya. Penanaman citra produk misalnya telah melahirkan akibat ganda. Satu sisi promosi produk yang dilakukan secara gencar telah sedemikian rupa mempengaruhi persepsi dan perilaku masyarakat tertentu mengenai nilai belanja dan nilai sesuatu barang. Citra sekaligus simbol seorang *businessmen*, atau seorang profesionalis adalah materi. Di sisi lain penanaman citra demikian ini kemudian melahirkan perburuan simbolik sehingga mengkondisikan tumbuhkembangnya kompetisi perburuan harta benda, yang pada akhirnya menjadi keserakahan. Keserakahan inilah yang mengkondisikan dan mencetuskan pelbagai bentuk penyimpangan dalam bisnis.

Ketiga adalah *the crimes of government*, yaitu penyalahgunaan wewenang birokrasi, kolusi, korupsi termasuk pengabaian-pengabaian terhadap ketentuan hukum, hak asasi manusia dan tindakan-tindakan politik yang dikategorikan ke dalam *political corruption* seperti kecurangan-kecurangan dalam pemilihan umum, teladan palsu, pesta-pesta palsu, dan seterusnya.”

Memperhatikan berbagai sisi kejadian kecurangan yang dipaparkan sebelumnya, sangat selaras dengan paparan Suparman (2003) tersebut, dalam mana kapitalisme telah merasuk ke dalam relung jiwa manusia Indonesia. Oleh karena itu untuk melawan berbagai tindak kecurangan yang secara gamblang menistakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka bangsa ini harus lebih kritis dan sensitif dalam mengakomodasi nilai-nilai kehidupan modern yang diusung oleh kapitalisme-liberalisme-materialisme-individualisme. Kita perlu melihat lagi semangat para pendahulu ketika berjuang meraih dan mempertahankan kemerdekaan negeri ini. Semangat yang dilandasi oleh cita-cita luhur mencapai kesejahteraan bersama. Bagaimana cita-cita luhur itu dicapai, butir-butir P4 dapat membuka pemahaman kita dalam mana manusia Indonesia harus:

- ✓ Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- ✓ Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
- ✓ Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- ✓ Menghormati hak orang lain.
- ✓ Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
- ✓ Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
- ✓ Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.

- ✓ Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
- ✓ Suka bekerja keras.
- ✓ Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
- ✓ Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Penutup

Untuk mengembangkan tata nilai kehidupan Pancasila, yang secara mendasar adalah harus adanya unsur keyakinan bahwa Pancasila merupakan ideologi yang tepat untuk bangsa Indonesia. Pancasila memuat konsep-konsep dasar yang menunjukkan adanya seperangkat keyakinan untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan, yaitu kemajuan bangsa Indonesia. Berdasarkan pandangan yang demikian maka Pancasila dapat dibawa ke dalam ranah berbagai media kehidupan kebangsaan, termasuk ranah profesi. Asshiddiqie (2011) menyatakan bahwa upaya pembudayaan Pancasila dapat diwujudkan secara konkrit dalam praktik kehidupan masyarakat, antara lain melalui perumusan kode etik dan kode perilaku beserta pelembagaan institusi penegaknya di lingkungan jabatan kenegaraan, pemerintahan, ormas, LSM dan Badan Usaha.

Hal lain yang harus dilakukan adalah loyalitas, dalam mana setiap ideologi selalu menuntut adanya loyalitas serta keterlibatan optimal para pendukungnya untuk mendapatkan derajat penerimaan optimal. Selain itu adalah komitmen moral para pemimpin atau penyelenggara negara untuk konsisten menjadikan Pancasila sebagai cara pandangnya dalam memangku amanah pengelolaan bangsa dan negara ini. Perilaku para pemimpin akan menjadi teladan terbaik bagi masyarakat, satunya kata dan perbuatan para pemimpin merupakan panutan yang terbaik dan efektif bagi rakyat.

“Padaku Tuan Ketua, yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup Negara, ialah semangat, semangat para penyelenggara Negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun kita membikin undang-undang yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara negara, pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, undang-undang dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktik” (Penuturan Soepomo dalam Latif, 2011; 485).

Terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah peran lembaga pendidikan. Secara institusional benteng moral kehidupan bangsa Indonesia saat ini adalah pendidikan. Pendidikan adalah media penyebaran ideologi yang paling efektif untuk generasi mendatang. Kurikulum harus adaftif terhadap penyebaran cara pandang Pancasila ini sehingga efektif membentuk karakter manusia Indonesia seutuhnya. Bukan dengan cara doktriner Pancasila ditanamkan, namun dengan pola yang lebih mengedepankan asah kritis peserta didik sehingga memahami Pancasila dengan segala potensi kecerdasannya, menyerap nilai-nilainya dengan ketulusan, mengimplementasikannya dengan keikhlasan, dan menyebarkannya dengan keyakinan.

Daftar Acuan

- Bologna, G.J. dan R.J. Lindquist. 1987. *Fraud Auditing and Forensic Accounting*. John Willey & Sons.
- Asshiddiqie, J. 2011. *Membudayakan Nilai-nilai Pancasila dan Kaedah-kaedah Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945*. Makalah dalam Kongres Pancasila III. Surabaya 31 Mei-1 Juni.
- Latif, Y. 2011. *Negara Paripurna; Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Ludigdo, U. 2012. *Memaknai Etika Akuntan Indonesia dengan Pancasila*. Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. 24 April 2012. www.accounting.feb.ub.ac.id/
- Puspito, N.T., M. Elwina S., I.S. Utari, Y. Kurniadi. 2011. *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian.
- Suparman, M. 2003. *Kapitalisme, Keserakahan dan Kejahatan*. Makalah disampaikan dalam seminar sehari dengan tema, "Keamanan dan Perdamaian di Indonesia" oleh PSKP UGM, 20 Januari 2003.

CURRICULUM VITAE

1. **N a m a** : **Prof. Dr. Unti Ludigdo, Ak., CA.**
2. Tempat/Tgl. Lahir : Trenggalek/14 Agustus 1969
3. Agama : Islam
4. N I P : 19690814 199402 1 001
5. Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I/IVb
Jabatan Akademik : Guru Besar
Jabatan Struktural : Ketua Jurusan Akuntansi FEB Universitas Brawijaya
6. Alamat
@ Kantor : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Telepon : 0341-551396
E-mail : unti_akuntansi@ub.ac.id
7. Bidang/Minat Keahlian : Akuntansi
Pokok/Utama : Etika Bisnis & Profesi

8. Pendidikan:

Macam	Tahun	Perguruan Tinggi	Program Studi	Spesialisasi	Kota/Negara
Pendidikan Bergelar:					
1. Sarjana	1993	Univ. Brawijaya	Akuntansi	-	Malang
2. Magister	1998	UGM	Akuntansi	-	Yogyakarta
3. Doktor	2005	Univ. Brawijaya	Ilmu Ekonomi	Etika Bisnis & Profesi	Malang

9. Pengalaman Pekerjaan

- a. Pengalaman dalam Jabatan Administrasi/Birokrasi/Struktural di Lingkungan Universitas Brawijaya

No.	Posisi/Jabatan	Masa Bakti	Institusi
1.	Sekretaris	1998-2000.	Pusat Sistem Informasi Manajemen dan Perencanaan FE Univ. Brawijaya
2.	Wakil Ketua	2000-2005	Penyunting Majalah Ilmiah FE Univ. Brawijaya "Lintasan Ekonomi",.
3.	Anggota Senat Wakil Dosen	2003-2007	FE Univ. Brawijaya
4.	Anggota Senat ex officio Ketua Jurusan	2007-2013	FE Univ. Brawijaya
5.	Ketua	2005-2007	Badan Pengembangan Sistem Informasi FE Univ. Brawijaya
6.	Direktur PHK A-3 Akuntansi	2006-2007	FE Univ. Brawijaya
7.	Ketua Jurusan Akuntansi	2007-2009 2009-2013	FEB Univ. Brawijaya
8.	Anggota Pusat Jaminan Mutu	2005-2008	Univ. Brawijaya
9.	Anggota Senat Universitas	2012-	Univ. Brawijaya

- b. Pengalaman dalam Jabatan Organisasi dan Profesi

No.	Posisi/Jabatan	Tahun	Institusi Pemberi Penugasan
1.	Staf Auditor	1993	KAP Hariadi & Rekan Malang
2.	Pengawas	2001-2002	KPRI Univ. Brawijaya
3.	Bendahara I	2002-2004	KPRI Univ. Brawijaya
4.	Ketua	2008-2010 2011-2013	KPRI Univ. Brawijaya
5.	Anggota	1994-...	Ikatan Akuntan Indonesia
6.	Koordinator Wilayah Jawa Timur	2006-2008	IAI Kompartemen Akuntan Pendidik

		2008-2010	
7.	Ketua Bidang Pendidikan	2010-2013	IAI Kompartemen Akuntan Pendidik
8.	Anggota Komite Etika	2007-2010 2010-2013	Ikatan Akuntan Indonesia
9.	Asesor Akreditasi Program Studi	2007-	Badan Akreditasi Nasional (BAN) PT
10.	Peneliti Senior	2008- 2009	The Indonesian Institute for Corporate Governance di Jakarta
11.	Anggota	2011-...	The International Association for Accounting Education & Research (IAAER)

10. Pengalaman dalam Editing/Review Jurnal:

- Jurnal Riset Akuntansi Indonesia Tahun 2009-skrng
- Jurnal Akuntansi Multiparadigma Tahun 2010-skrng
- Jurnal Ekuitas Tahun 2010-skrng
- Jurnal Dinamika Akuntansi Tahun 2010-skrng

11. Prestasi Akademik yang Pernah Dicapai:

No.	Uraian Prestasi	Tahun	Institusi Penyelenggara Kegiatan
1.	Nominator 10 Besar Makalah Terbaik pada Lomba Karya Tulis Konvensi Nasional Akuntansi	2000	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
2.	Lulus dengan Predikat <i>Cumlaude</i> pada Program S-3 PPS-Unibraw	2005	PPS-Unibraw
3.	Dosen Berprestasi I Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya	2005	FE-Unibraw
4.	Dosen Berprestasi IV Universitas Brawijaya	2005	Unibraw
5.	Pemakalah Terbaik I dalam Konferensi Nasional Akuntansi tentang <i>Good Governance</i>	2005	FE-Univ. Trisakti
6.	Ketua Program Studi/Ketua Jurusan Berprestasi I Universitas Brawijaya tahun 2010	2010	Universitas Brawijaya
7.	Peserta Ketua Program Studi/Ketua Jurusan Berprestasi Nasional tahun 2010	2010	Ditjen Dikti Kemendiknas

Malang, 28 Oktober 2013

Prof. Dr. Unti Ludigdo, Ak, CA.